

ABSTRAK

Dalam perkembangan terakhir ini, banyak negara mencoba alternatif ke arah liberalisasi melalui Perdagangan Bebas Kawasan. Saat ini, ASEAN maupun China sadar bahwa tidak ada negara atau kawasan yang mampu menentukan jenis ekonomi yang mereka inginkan sendiri/ tertutup. Mereka harus membuka diri dan menerima sistem perdagangan internasional.

Hubungan antara ASEAN dan China semakin dipererat setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA – ASEAN-China *Free Trade Agreement*). Kesepakatan perdagangan ini berupa penghapusan bea masuk (BM) secara bertahap, yang terdiri dari enam kategori program yakni *Early Harvest Program* (EHP) tahap 1, EHP-2, *normal track* (NT) tahap 1, NT-2, *Sensitive track* (ST), dan *Higly Sensitive Track* (HST).

Secara teoritis, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara itu. Namun, dalam kenyataan, atau paling tidak dari beberapa penelitian empiris, menyatakan bahwa dengan semakin terbukanya suatu perekonomian tidak serta-merta menciptakan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat

Dengan menghilangkan proteksi berupa tarif BM, konsumen di setiap negara akan memiliki semakin banyak pilihan produk untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang semakin kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Namun kesepakatan perdagangan ini juga berpeluang gagal mengangkat beberapa elemen fundamental untuk mengedepankan ekonomi berkelanjutan dari para pelaku usaha, khususnya dari sisi ASEAN. Di satu sisi, ACFTA akan menciptakan kompetisi yang semakin ketat, sehingga penerapan ACFTA dapat mendorong peningkatan kualitas produksi nasional. Namun di sisi lain, justru bisa mengancam kehidupan industri domestik sebab daya saing industri lokal belum sebanding dengan China.

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana hubungan perdagangan antara ASEAN (Indonesia) dan China dengan melihat fakta-fakta yang ada, ditinjau dari bentuk kesepakatan perdagangan berupa penghapusan bea masuk (BM) secara bertahap. Dengan penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana kinerja perdagangan komoditas pertanian Indonesia-China dan kerjasama ACFTA sebelum dan sesudah dicapainya kesepakatan, apa saja yang harus diwaspadai dalam hubungan ini, dan dampak apa yang mungkin terjadi bagi Indonesia dari kesepakatan ini. Sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh kesepakatan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas ini di satu sisi dapat membuat Indonesia dapat menikmati berkurangnya hambatan non-tarif atas berbagai produk Indonesia yang diekspor ke China, namun kesepakatan ini juga mengakibatkan dampak negatif terhadap makro ekonomi dan hasil sektoral baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti yang tampak pada interaksi antara kurva permintaan dan penawaran komoditi ekspor yang termasuk dalam EHP,

menghasilkan titik keseimbangan baru pada harga yang lebih tinggi dengan kuantitas yang lebih rendah. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek, diberlakukannya Program Panen Awal (EHP), sebagai fase awal ACFTA mengakibatkan tingkat impor Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan tingkat ekspor (terjadi defisit neraca perdagangan) sehingga menyebabkan PDB riil menurun dan konsumsi rumah tangga akan mengalami peningkatan. Selain itu, upah dan sewa modal juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan ongkos produksi pada semua industri menjadi lebih mahal. Karena harga dalam negeri meningkat relatif terhadap harga impor, maka produk-produk impor akan masuk ke Indonesia guna menggantikan produk-produk dalam negeri.

Secara umum ada tiga masalah yang berhubungan dengan kebijakan ini. (1) kemampuan sebenarnya dari produk-produk untuk bersaing dengan China (di pasar domestik Indonesia) dan dengan negara-negara ASEAN lainnya (di China); (2) ketidakmampuan sektor pertanian Indonesia untuk menghasilkan produk-produk pertanian dengan kualitas baik dan jumlah yang banyak secara berkelanjutan.; dan (3) minimnya fokus pemerintah terhadap sektor pertanian.

